

**Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja di Pulau Kalimantan**

JURNAL



Oleh:

Nama : Arizka Sofiyana Maharani

Nomor Mahasiswa : 13313131

Jurusan : Ilmu Ekonomi

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2017

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA DI PULAU KALIMANTAN

Arizka Sofiyana Maharani

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

arizkasofi@gmail.com

ABSTRAK

Kondisi Ketenagakerjaan di Indonesia dihadapkan dengan permasalahan yang cukup memprihatinkan ditandai dengan jumlah pengangguran yang cukup besar. BPS (Badan Pusat Statistik) menyebutkan angka pengangguran pada Agustus 2015 sebanyak 7,56 juta orang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penyerapan tenaga kerja di Indonesia rendah. Namun demikian tidak semua wilayah di Indonesia tingkat penyerapan tenaga kerjanya rendah, di pulau Kalimantan BPS (Badan Pusat Statistik) mencatat bahwa penyerapan tenaga kerja di tahun 2015 naik 50 persen atau mencapai 208.850 tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang terus meningkat menunjukkan bahwa tingkat usia produktif yang berkembang, serta jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) masyarakat yang bergantung pada penyerapan tenaga kerja.

Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Provinsi dan Investasi terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Pulau Kalimantan pada tahun 2006-2015. Data yang digunakan merupakan data sekunder, berasal dari data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Penelitian ini menggunakan data panel yang terdiri dari empat provinsi dengan model regresi *Fixed Effect*.

Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Upah Minimum Provinsi berhubungan negatif dan signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Sejalan pada keterkaitan Investasi baik dalam negeri maupun luar negeri menurut Wara (2016) berpengaruh atau tidaknya investasi terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tergantung pada kategori orientasi investasi. Industri padat karya atau industri padat modal inilah yang juga bisa berkaitan dengan preferensi masing-masing investor tentang kondisi iklim ekonomi yang terjadi sebagai bahan pertimbangan.

Kata Kunci: *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Provinsi, Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negri.*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pembangunan merupakan proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Pembangunan ekonomi memiliki tiga tujuan inti antara lain peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup, peningkatan standar hidup (pendapatan, penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan) dan perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial (Todaro, 2000).

Kependudukan dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang sangat erat, jumlah penduduk menentukan efisiensi perekonomian dan kualitas dari tenaga kerja itu sendiri, karena akan menjadi sebuah kontribusi ataupun menjadi kendala dalam sebuah pertumbuhan ekonomi (Wara, 2016). Peningkatan jumlah penduduk membawa konsekuensi penambahan jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja yang tumbuh lebih cepat daripada kesempatan kerja akan memperbesar jumlah pengangguran yang kemudian akan berdampak pada perekonomian bangsa. Semua memerlukan lebih banyak investasi, dan investasi berasal dari tabungan yang disisihkan untuk kepentingan modal berproduktivitas. Bagi negara berkembang sangat sulit memiliki kapital karena unsur SDM semakin banyak dan tidak ada sumber produktivitas yang dilaksanakan sehingga tidak ada pendapatan, sumber tabungan pun tidak ada (Irawan dan Suparmoko, 2012). Menurut Suparmoko (1998) penyerapan tenaga kerja menjadi suatu hal yang teramat penting dalam peningkatan ekonomi secara agregat seperti pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh pada jumlah produksi barang dan jasa meningkat yang berpengaruh pada aktifnya perdagangan.

Faktor tingkat upah juga masuk ke dalam penelitian ini di karenakan tingkat upah dapat mempengaruhi orang untuk masuk atau tidak ke pasar tenaga kerja, dimana tingkat jika upah tinggi maka makin banyak masyarakat akan masuk ke dalam pasar tenaga kerja dan secara otomatis meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Selama ini masalah yang sering timbul dalam hal pengupahan adalah adanya perbedaan pengertian dan kepentingan mengenai upah antara pengusaha dan pekerja sehingga dalam hal ini diperlukan kebijakan pemerintah untuk mengatasi perbedaan

kepentingan tersebut. Perbaikan upah berarti peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat akan meningkatkan permintaan barang dan jasa yang kemudian pada gilirannya secara makro mendorong perusahaan untuk menambah produksi.

Selain upah faktor lain yang juga masuk ke dalam penelitian ini adalah investasi. Menurut Todaro (2000), bahwa kenaikan tingkat output dan kesempatan kerja dapat dilakukan dengan adanya akumulasi modal (investasi) dan tabungan. Hal ini menunjukkan hubungan yang positif antara investasi dengan penyerapan tenaga kerja. Namun demikian, tidak selamanya adanya investasi dapat menyerap tenaga kerja, di negara-negara maju memiliki faktor produksi yang padat modal, sehingga investasi yang mereka tanamkan di negara berkembang cenderung padat modal.

Melihat dari uraian di atas, mengenai faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), lalu bagaimana dengan kondisi tenaga kerja di negara Indonesia? Karena kondisi ketenagakerjaan sangatlah mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia dihadapkan dengan permasalahan yang cukup memprihatinkan ditandai dengan jumlah pengangguran yang cukup besar. BPS (Badan Pusat Statistik) menyebutkan angka pengangguran pada Agustus 2015 sebanyak 7,56 juta orang. Pada Agustus 2015, tingkat pengangguran terbuka menurut pendidikan didominasi oleh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 12,65 persen, Sekolah Menengah Atas (SMA) 10,32 persen, Diploma 7,54 persen, Sarjana 6,40 persen, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 6,22 persen dan Sekolah Dasar (SD) ke bawah 2,74 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penyerapan tenaga kerja di Indonesia rendah. Salah satu faktor yang mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah penyerapan tenaga kerja, seperti yang sudah di uraikan di atas bahwa tingkat penyerapan tenaga kerja di Indonesia rendah, lalu bagaimana dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Indonesia mengingat dua hal tersebut saling berkaitan. Di bawah ini merupakan tabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Indonesia.

Tabel 1.1

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Di Indonesia (%)

Tahun	TPAK
2006	66,16
2007	66,99
2008	67,18
2009	67,23
2010	67,72
2011	66,78
2012	67,76

2013	66,77
2014	66,60
2015	65,76

Sumber: www.bps.go.id

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Indonesia secara umum dari tahun 2006-2015 mengalami fluktuasi atau naik turun. Dari tabel di atas terlihat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tertinggi di tahun 2007 dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terendah di tahun 2015.

Seperti yang sudah di uraikan di atas bahwa penyerapan tenaga kerja di Indonesia terbilang rendah, namun demikian tidak semua wilayah di Indonesia tingkat penyerapan tenaga kerjanya rendah, di pulau Kalimantan BPS (Badan Pusat Statistik) mencatat bahwa penyerapan tenaga kerja di tahun 2015 naik 50 persen atau mencapai 208.850 tenaga kerja. Kontributor utama penyerapan tenaga kerja di pulau Kalimantan adalah provinsi Kalimantan Timur, jumlahnya mencapai 91.055 tenaga kerja atau sekitar 43 persen dari total penyerapan tenaga kerja di Kalimantan. Di ikuti provinsi Kalimantan Barat dengan 47.001 tenaga kerja, Kalimantan Selatan 29.259 tenaga kerja, Kalimantan Tengah 26.331 dan Kalimantan Utara 15.204. Jumlah tenaga kerja yang terus meningkat menunjukkan bahwa tingkat usia produktif yang berkembang, serta jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) masyarakat yang bergantung pada penyerapan tenaga kerja. Lalu bagaimana Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di pulau Kalimantan?, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di pulau Kalimantan akan terlihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 1.2

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Provinsi di Pulau Kalimantan (%)

Tahun	Provinsi			
	Kalimantan Barat	Kalimantan Tengah	Kalimantan Selatan	Kalimantan Timur
2006	73.71	72.37	70.43	67.27
2007	72.47	71.33	73.15	61.76
2008	73.66	71.24	71.35	64.31
2009	73.45	71.22	71.61	64.41
2010	73.17	69.86	71.26	66.41
2011	72.41	70.14	71.94	66.56
2012	71.4	69.88	71.95	66.37
2013	69.53	68.5	69.31	63.5
2014	69.93	68.56	69.46	64.1
2015	69.68	71.11	69.73	62.39

Sumber: www.bps.go.id

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2006-2015 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di pulau Kalimantan mengalami kenaikan dan penurunan. Dari empat provinsi di pulau Kalimantan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang paling tinggi di provinsi Kalimantan Barat dan yang paling rendah di provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu pada penelitian ini yang menjadi sorotan penulis mengenai proses dari implikasi masalah kependudukan dan lapangan kerja menjadi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Dengan demikian, menurut penulis perlu kiranya dilakukan penelitian tentang Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di pulau Kalimantan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dan merencanakan program pembangunan untuk meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dalam sebuah skripsi yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Di Pulau Kalimantan”.

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka pokok permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di pulau Kalimantan?
2. Bagaimana pengaruh upah terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di pulau Kalimantan?
3. Bagaimana pengaruh investasi terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di pulau Kalimantan?

II. KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Daru Mahendra Wara (2016), melakukan penelitian berjudul Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum dan Investasi Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Pada 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014, dengan menggunakan metode analisis data panel. Adapun variabel-variabel dalam penelitian antara lain: TPAK, PDRB, Upah Minimum dan Investasi. Kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian tersebut adalah PDRB dan Upah Minimum berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di provinsi Jawa Timur, sedangkan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di provinsi Jawa Timur.

Niddaul Izzah (2015) melakukan penelitian berjudul Analisis Dampak Kenaikan Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Pengangguran dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Jakarta 2004-2013, dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Adapun variabel-variabel dalam penelitian antara lain: Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian tersebut adalah Upah Minimum

berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.

Ilham Akbar (2011), melakukan penelitian berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita Kota Makasar Periode 2000-2009, dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Adapun variabel-variabel dalam penelitian antara lain: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita, PDRB dan Upah Minimum. Kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian tersebut adalah PDRB dan Upah Minimum berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita di kota Makasar.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Tenaga Kerja

Menurut Simanjuntak (1998), tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Pencari kerja, bersekolah dan mengurus rumah tangga walaupun tidak bekerja, tetapi mereka secara fisik mampu dan sewaktu-waktu dapat ikut bekerja. Mulyadi (2003) menyatakan bahwa tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15–64 tahun) atau jumlah penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.

2.2.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Menurut Mulyadi (2003) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah situasi yang menggambarkan jumlah angkatan kerja dalam suatu kelompok umum sebagai presentase penduduk dalam kelompok umur tersebut. Adapun dalam Badan Pusat Statistik (2016) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap penduduk yang berumur 15 tahun ke atas.

2.2.3 Permintaan Tenaga Kerja

Menurut Sudarsono (1988), permintaan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan seorang pengusaha pada setiap kemungkinan tingkat upah dalam jangka waktu tertentu. Miller dan Meiners berpendapat bahwa permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh nilai marjinal produk (*Value of Marginal Product*, *VMP*). Nilai marjinal produk (*VMP*) merupakan perkalian antara Produk Fisik Marginal (*Marginal Physical Product*) dengan harga produk yang bersangkutan.

2.2.4 Penawaran Tenaga Kerja

Simanjuntak (1985), mendefinisikan penawaran tenaga kerja merupakan jumlah usaha atau jasa kerja yang tersedia dalam masyarakat untuk menghasilkan barang dan jasa.

Menurut Bellante (1990), jumlah tenaga kerja keseluruhan yang disediakan bagi suatu perekonomian tergantung pada jumlah penduduk, persentase jumlah penduduk yang memilih masuk dalam angkatan kerja dan jumlah jam kerja yang ditawarkan oleh angkatan kerja. Lebih lanjut masing-masing dari ketiga komponen ini dari jumlah tenaga kerja yang ditawarkan tergantung pada upah pasar.

2.2.5 Pasar Tenaga Kerja

Menurut Simanjuntak (1998), pasar kerja adalah seluruh aktivitas dan pelaku-pelaku yang mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja. Pasar tenaga kerja dibutuhkan karena dalam kenyataannya terdapat banyak perbedaan-perbedaan di kalangan pencari kerja dan di antara lowongan kerja. Perbedaan-perbedaan tersebut antara lain:

- a. Pencari kerja mempunyai tingkat pendidikan, keterampilan, kemampuan dan sikap pribadi yang berbeda.
- b. Setiap perusahaan menghadapi lingkungan yang berbeda: luaran (output), masukan (input), manajemen, teknologi, lokasi, pasar, dll, sehingga mempunyai kemampuan yang berbeda dalam memberikan tingkat upah, jaminan sosial dan lingkungan pekerjaan.
- c. Baik pengusaha maupun pencari kerja sama-sama mempunyai informasi yang terbatas mengenai hal-hal yang dikemukakan dalam butir (a) dan (b).

2.2.6 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno 2005). Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang yang dapat diukur berdasarkan kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa dari satu periode ke periode lainnya. Kemampuan tersebut disebabkan adanya faktor-faktor produksi yang akan selalu bertambah jumlah dan kualitasnya.

2.2.7 Upah

Menurut Sukirno (2005), upah dapat diartikan sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Sumarsono (2003), berpendapat bahwa perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tingginya rendahnya biaya produksi perusahaan.

Dalam persaingan murni pasar tenaga kerja, tingkat upah ditentukan oleh kekuatan pasar, sehingga seorang pekerja akan menerima upah berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja dalam pasar tenaga kerja.

2.2.8 Upah Minimum

Menurut Tjiptoherijanto (1990), upah minimum adalah upah yang ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional maupun sub sektoral. Dalam hal ini upah minimum adalah upah pokok dan tunjangan. Upah minimum ditetapkan berdasarkan persetujuan dewan pengupahan yang terdiri dari pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja. Tujuan dari ditetapkan upah minimum adalah untuk memenuhi standar hidup minimum sehingga dapat mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah.

2.2.9 Kekakuan Upah

Mankiw (2000), menyatakan bahwa teori kekakuan upah adalah teori yang menyatakan bahwa salah satu penyebab masalah pengangguran adalah upah, yaitu ketika terjadi kekakuan upah di mana upah gagal bergerak menuju posisi keseimbangan pada pasar tenaga kerja.

2.2.10 Investasi

Menurut Hartono (2006), pengeluaran investasi adalah pembelian barang kapital baru seperti mesin-mesin, pabrik dan peralatan untuk menambah stok barang kapital yang telah ada. Sedangkan menurut Dumairy (1996), investasi adalah penambahan barang modal secara neto positif. Seseorang yang membeli barang modal tetapi ditujukan untuk mengganti barang modal yang telah mengalami kerusakan dalam proses produksi bukanlah merupakan investasi, tetapi disebut dengan pembelian barang modal untuk mengganti.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Data sekunder biasanya telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Pada penelitian ini data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang meliputi data TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja), PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), UPM (Upah Minimum Provinsi), PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dan PMA (Penanaman Modal Asing). Data sekunder ini menggunakan metode data panel. Data panel yakni gabungan antara data tempat atau ruang (*Cross Section*) dan data antar waktu (*Time Series*). Data ini merupakan data yang dikumpulkan dalam kurun waktu dan tempat tertentu dari sampel. Sumber data-data sekunder yang di ambil meliputi:

1. Data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Provinsi di Pulau Kalimantan periode tahun 2006-2015.
2. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku menurut Provinsi di Pulau Kalimantan periode tahun 2006-2015.
3. Data Upah Minimum Provinsi periode tahun 2006-2015.
4. Data Penanaman Modal Luar Negeri menurut Provinsi di Pulau Kalimantan periode tahun 2006-2015.
5. Data Penanaman Modal Dalam Negeri menurut Provinsi di Pulau Kalimantan periode tahun 2006-2015.

3.2 Metode Analisis

Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Penanaman Modal Asing (PMA) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Ketimpangan distribusi pendapatan, penelitian ini menggunakan metode Panel Data.

Dimana:

- Y = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
 X_1 = Produk Domestik Regional Bruto
 X_2 = Upah Minimum Provinsi
 X_3 = Investasi (Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri).

Untuk menilai apakah model regresi yang dihasilkan merupakan model yang paling sesuai, dibutuhkan beberapa pengujian dan analisis diantaranya adalah uji chow, uji t, uji f dan uji koefisien determinasi (R^2).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pemilihan Model Regresi Panel

4.1.1 Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Pool: POOL01

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	11.554974	(3,32)	0.0000
Cross-section Chi-square	29.357720	3	0.0000

Berdasarkan tabel di atas nilai *cross section F* dari perhitungan menggunakan *Eviews 8* adalah sebesar 11.554974 dengan probabilitas 0.0000 (kurang dari 5%), sehingga secara statistik H_0 ditolak dan H_1 diterima, maka model yang tepat digunakan adalah model estimasi *Fixed Effect*.

4.1.2 Hasil Estimasi Fixed Effect

Dari hasil regresi di bawah dapat dilihat bahwa, dari probabilitas tiap individu yang menunjukkan, dari empat variabel independen ada 3 variabel yang berpengaruh signifikan yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Miminum Provinsi (UMP) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Sedangkan variabel Penanaman Modal Dalam Negri (PMDN) tidak berpengaruh signifikan. R-square menunjukkan hasil yang cukup memuaskan yaitu sebesar 0.890428, lebih besar dari R-square model estimasi *Common Effect* sedangkan F-statistik sebesar 37.14931 yang juga lebih besar dari F-statistik model estimasi *Common Effect*

Dependent Variable: TPAK?

Method: Pooled Least Squares

Date: 02/21/17 Time: 22:34

Sample: 2006 2015

Included observations: 10

Cross-sections included: 4

Total pool (balanced) observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	71.13611	0.693547	102.5686	0.0000
PDRB?	1.41E-05	7.61E-06	1.858128	0.0724
PMA?	2.05E-05	1.14E-05	1.790348	0.0829
PMDN?	-9.64E-05	9.47E-05	-1.018378	0.3161
UMP?	-2.82E-06	7.75E-07	-3.634796	0.0010
Fixed Effects				
(Cross)				
_KB--C	2.652910			
_KT--C	2.243435			
_KS--C	2.352515			
_KTI--C	-7.248860			

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.890428	Mean dependent var	69.52225
Adjusted R-squared	0.866459	S.D. dependent var	3.228722
S.E. of regression	1.179880	Akaike info criterion	3.345560
Sum squared resid	44.54777	Schwarz criterion	3.683336
Log likelihood	-58.91120	Hannan-Quinn criter.	3.467689
F-statistic	37.14931	Durbin-Watson stat	1.719772
Prob(F-statistic)	0.000000		

4.2 Analisis Hasil Regresi

4.2.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) adalah sesuatu yang menunjukkan seberapa besar variasi variabel dependen Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Pada model estimasi *Fixed Effect*, R^2 sebesar 0.890428 artinya, variasi variabel dependen Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja hanya mampu dijelaskan oleh variabel independen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) melalui model sebesar 89.04% sedangkan sisanya sebesar 10.96% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

4.2.2 Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui signifikan atau tidak signifikannya variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Dari hasil estimasi F-statistik dalam perhitungan menggunakan E-views sebesar 37.14931 dan probabilitasnya sebesar 0.000000 (kurang dari 5%), sehingga dapat disimpulkan bahwa secara estimasi *Fixed Effect*, variabel-variabel independen yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.

4.2.3 Uji t

1. Variabel X1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Dari hasil estimasi koefisien variabel independen X1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah 1.41E-05 dan t-statistik sebesar 1.858128 sedangkan probabilitasnya sebesar 0.0724 sehingga, secara statistik variabel independen X1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) signifikan mempengaruhi variabel dependen Y Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

2. Variabel X2 Upah Minimum Provinsi (UMP)

Dari hasil estimasi koefisien variabel independen X2 Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah -2.82E-06 dan t-statistik sebesar -3.634796 sedangkan probabilitasnya sebesar 0.0010 sehingga, secara statistik variabel independen X2 Upah Minimum Provinsi (UMP) signifikan mempengaruhi variabel dependen Y Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

3. Variabel X3 Investasi (PMA dan PMDN)

Dalam penelitian ini variabel independen X3 Investasi, terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negri (PMDN). Dari hasil estimasi koefisien Penanaman Modal Asing (PMA) adalah $2.05E-05$ dan t-statistik sebesar 1.790348 sedangkan probabilitasnya sebesar 0.0829 sehingga, secara statistik Penanaman Modal Asing (PMA) signifikan mempengaruhi variabel dependen Y Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Sedangkan koefisien Penanaman Modal Dalam Negri (PMDN) adalah $-9.64E-05$ dan t-statistik sebesar -1.018378 sedangkan probabilitasnya sebesar 0.3161 sehingga, secara statistik Penanaman Modal Dalam Negri (PMDN) tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen Y Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

4.3 Hasil dan Analisis

4.3.1 Analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Hasil regresi data panel menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Yang berarti bahwa kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan menaikkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Koefisien variabel independen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah $1,41E-05$ dengan probabilitas sebesar 0.0724. Hasil ini menjelaskan bahwa setiap kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 1 miliar rupiah maka akan menaikkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 0.000141 persen.

Sejalan pada keterkaitan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Todaro (2006), pertumbuhan penduduk disertai dengan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran domestiknya juga lebih besar. Selanjutnya dikatakan bahwa pengaruh positif atau negatif dari pertumbuhan penduduk tergantung pada kemampuan sistem perekonomian daerah tersebut dalam menyerap dan secara produktif memanfaatkan penambahan tenaga kerja tersebut.

4.3.2 Analisis Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Hasil dari regresi data panel menunjukkan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Yang berarti bahwa kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) akan menurunkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Koefisien variabel

independen Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah $-2,82E-06$ dengan probabilitas sebesar 0.0010. Hasil ini menjelaskan bahwa setiap kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 1 ribu rupiah maka akan menurunkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 0.0000282 persen.

Sejalan pada keterkaitan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Wara (2016) ada beberapa indikator yang menyebabkan pengaruh negatif Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) diantaranya yaitu berkurangnya jumlah angkatan kerja seiring dengan peningkatan upah. Sisi permintaan tenaga kerja bagi perusahaan, pemberian upah yang semakin tinggi dapat lebih mengintensifkan produktivitas perorangan karyawannya, maka tidak diperlukan lagi penambahan karyawan. Akhirnya tidak adanya peningkatan jumlah angkatan kerja pada waktu tersebut.

4.3.3 Analisis Investasi (PMA) terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Dalam penelitian ini variabel independen X3 Investasi, terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Hasil dari regresi data panel menunjukkan investasi dari luar negeri yang di tercermin dari Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Yang berarti bahwa kenaikan Penanaman Modal Asing (PMA) akan menaikkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Koefisien variabel independen Penanaman Modal Asing (PMA) adalah 0.0000205 dengan probabilitas sebesar 0.0829. Hasil ini menjelaskan bahwa kenaikan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 1 juta US\$ maka akan meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 0.0000205.

Sejalan dengan hasil analisis di atas menurut Wara (2016) berpengaruh atau tidaknya investasi terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tergantung pada kategori orientasi investasi. Industri padat karya atau industri padat modal inilah yang juga bisa berkaitan dengan preferensi masing-masing investor tentang kondisi iklim ekonomi yang terjadi sebagai bahan pertimbangan.

Pada kondisi padat karya lebih banyak menggunakan tenaga kerja manusia jika dibandingkan dengan tenaga mesin pendekatan tersebut merupakan pendekatan yang bersifat untuk mengkreasikan pengembangan diri melalui penyerapan tenaga kerja diharapkan akan timbul suatu jumlah produktivitas yang bertahap nantinya.

Dalam padat modal jelas menginginkan produktivitas yang bergerak cepat, efisiensi biaya pada faktor input, pengendalian teknologi tinggi dan kemutakhiran. Menjadikan kualifikasi tenaga kerja yang begitu tinggi yang akan berdampak penyerapan tenaga kerja yang cenderung sedikit karena pemanfaatan teknologi tinggi yang menuntut keahlian dan spesialisasi bagi tenaga kerja yang lain dalam mengoperasikan sebuah alat teknologi tersebut.

V. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di pulau Kalimantan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian dalam penelitian menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Yang berarti bahwa kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan menaikkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di pulau Kalimantan.
2. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Yang berarti bahwa kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) akan menurunkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di pulau Kalimantan.
3. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Yang berarti kenaikan Penanaman Modal Asing (PMA) akan menaikkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Sedangkan untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tidak berpengaruh terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Menurut Wara (2016) berpengaruh atau tidaknya investasi terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tergantung pada kategori orientasi investasi. Industri padat karya atau industri padat modal inilah yang juga bisa berkaitan dengan preferensi masing-masing investor tentang kondisi iklim ekonomi yang terjadi sebagai bahan pertimbangan. Pada kondisi padat karya lebih banyak menggunakan tenaga kerja manusia jika dibandingkan dengan tenaga mesin pendekatan tersebut merupakan pendekatan yang bersifat untuk mengkreasikan pengembangan diri melalui penyerapan tenaga kerja diharapkan akan timbul suatu jumlah produktivitas yang bertahap nantinya. Dalam padat modal jelas menginginkan produktivitas yang bergerak cepat, efisiensi biaya pada faktor input, pengendalian teknologi tinggi dan kemitakhiran. Menjadikan kualifikasi tenaga kerja yang begitu tinggi yang akan berdampak penyerapan tenaga kerja yang cenderung sedikit karena pemanfaatan teknologi tinggi yang menuntut keahlian dan spesialisasi bagi tenaga kerja yang lain dalam mengoperasikan sebuah alat teknologi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Ilham. 2011. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita Kota Makassar Periode 2000-2009", Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Hasanuddin. Makassar
- Bellante, Don dan Jackson, Mark. 1990. *Ekonomi Ketenagakerjaan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- BPS. 2016. *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Provinsi*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/0614> pada 13 Oktober 2016
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga
- Hartono, Tony. 2006. *Mekanisme Ekonomi*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Irawan, dan Suparmoko. 2012. *Ekonomika Pembangunan Edisi Keenam*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Izzah, Niddaul. 2015. "Analisis Dampak Kenaikan Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Pengangguran dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Jakarta 2004-2013", Jurnal, Fakultas Ilmu Administrasi, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen. Jakarta
- Mankiw, N Gregory. 2000. *Teori Makroekonomi Edisi Keempat*. Terjemahan: Imam Nurmawan. Erlangga. Jakarta
- Mulyadi, S. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia: Dalam Perspektif Pembangunan*.
- Simanjuntak, Payman J. 1985. *Produktivitas dan Tenaga Kerja Indonesia*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Simanjuntak, Payman J. 1998. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. 2 ed. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Sudarsono, dkk. 1988. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Kurnia Jakarta: Universitas Terbuka Jakarta
- Sukirno, Sadono. 2005. *Makro Ekonomi Modern*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sumarsono, Sonny. 2003. *Upah Minimum bagi Buruh dan Strategi Perjuangan Serikat Pekerja atau Serikat Buruh*. Jurnal Analisis Sosial vol. 7, No.1, Hal 77

Suparmoko. 1998. *Pengantar Ekonomika Makro*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Tjiptoherijanto, Prijono. 1990. “Upah Minimal dan Serikat Pekerja”, dalam *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Todaro, Michael p. 2000. *Pembangunan ekonomi di dunia ketiga edisi ketujuh* Terjemahan: haris munandar. Erlangga. Jakarta

Wara, Daru Mahendra. 2016. “Analisis Pengaruh Produk Domestik Bruto, Upah Minimum dan Investasi Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Pada 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2014”, Jurnal, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Brawijaya. Malang

